



**PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA**

2025



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**



bapperida@natunakab.go.id

<https://bp3d.natunakab.go.id>





2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKj dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. Maka dari itu, LKj adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 juga bertujuan sebagai:

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas; dan
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (Penja) dan semua program yang dilaksanakan juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD periode 2021-2026 ke RPJMD Periode 2025-2029, sehingga kinerja yang diukur mengacu pada Renstra periode 2025-2029. Laporan ini memuat hasil capaian kinerja yang diukur dalam empat Indikator Kinerja Sasaran yang mengukur keberhasilan dari empat Sasaran Strategis, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Perencanaan	Nilai	80,00	79,00	98,75
2	Indeks Inovasi	Nilai	43,00	45,35	100,00
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	76,90	98,58
4	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,10	4,02	98,05
Rata-rata capaian kinerja					98,84



2025

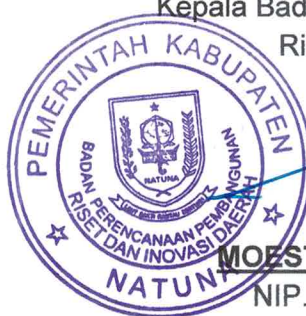
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

Sebagai mana terlihat pada table diatas, pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 di peroleh hasil rata-rata capaian 98,84% kategori AA (sangat memuaskan). Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari komitmen penuh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna beserta dukungan segenap pejabat dan staf/pegawai dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, disamping terjalin koordinasi, sinkronisasi baik dengan OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun Pemerintah Pusat.

Adapun Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna dapat dijelaskan dari jumlah belanja langsung sebesar Rp 8.622.443.800,00 yang dialokasikan untuk mendukung Indikator Kinerja Sasaran, dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 7.996.479.168,00 atau 92,74%. Efisiensi penggunaan sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebesar 7,26%.

Ranai, 19 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE.,MAP
NIP. 19731030 200012 1 003



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr, Wb,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah disampaikan dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden No 29 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Petunjuk Pelaksana Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selama tahun 2025, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban, Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran yang ditetapkan dalam bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Laporan Kinerja juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat digunakan untuk memperbaiki dan



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Demikianlah laporan ini di sampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dimasa yang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb:

Ranai, 19 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE.,MAP

NIP. 19731030 200012 1 003



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Gambaran Umum	3
1.5. Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis.....	9
2.1.1. Visi dan Misi.....	10
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	12
2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
2.2. Perjanjian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan.....	26
3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran.....	30
3.1.3 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	54
3.1.4 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	72
3.2. Realisasi Anggaran.....	74
3.2.1 Rekapitulasi Utang dan Piutang Tahun 2025.....	78
3.3 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja.....	79
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	81



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	13
Tabel 2.2	: Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	13
Tabel 2.3	: Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	14
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	15
Tabel 2.5	: Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Sasaran Strategis Tahun 2025.....	17
Tabel 3.1	: Skala Penilaian	26
Tabel 3.2	: Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025.....	27
Tabel 3.3	: Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022-2025.....	28
Tabel 3.4	: Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra.....	29
Tabel 3.5	: Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025.....	30
Tabel 3.6	: Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Pemerintah Daerah.....	31
Tabel 3.7	: Perbandingan Indeks Perencanaan Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya tahun 2022-2024.....	34
Tabel 3.8	: Perbandingan Indeks Perencanaan Kabupaten Natuna tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029.....	34
Tabel 3.9	: Perbandingan Capaian Indeks Perencanaan Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional.....	35
Tabel 3.10	: Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Perencanaan Tahun 2025.....	38
Tabel 3.11	: Perbandingan Indeks Inovasi daerah tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 2022-2024.....	40
Tabel 3.12	: Perbandingan Realisasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029.....	41



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

Tabel 3.13	: Perbandingan Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional.....	41
Tabel 3.14	: Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025.....	44
Tabel 3.15	: Perbandingan Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 2022-2024.....	46
Tabel 3.16	: Perbandingan Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029.....	47
Tabel 3.17	: Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025.....	49
Tabel 3.18	: Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 2022-2024.....	51
Tabel 3.19	: Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029.....	52
Tabel 3.20	: Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2025.....	54
Tabel 3.21	: Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025	55
Tabel 3.22	: Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022-2025.....	62
Tabel 3.23	: Perbandingan Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025 dengan target akhir Renstra.....	68
Tabel 3.24	: Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Kinerja Tahun 2025.....	73
Tabel 3.25	: Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	74
Tabel 3.26	: Rekapitulasi Hutang Tahun 2025.....	78
Tabel 3.27	: Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024.....	79
Tabel 3.28	: Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu Internal atas Laporan Kinerja Tahun 2025.....	80
Tabel 4.1	: Capaian Kinerja Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 2025-2029 Tahun 2025.....	82



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapperida Kabupaten Natuna.....	6
Gambar 3.1	: Indeks Perencanaan Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	32
Gambar 3.2	: Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025.....	39
Gambar 3.3	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025.....	45
Gambar 3.4	: Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2025.....	50



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Lampiran II	: Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Lampiran III	: Cascading Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dapat dipertanggungjawabkannya capaian melalui mekanisme akuntabilitas publik. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

1.2. Landasan Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah ini disusun berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban dalam memberikan informasi kinerja instansi. Adapun tujuan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang disusun ini antara lain:

01 Mempertanggungjawabkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang

baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.

02 Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Perencanaan Pembangunan, Riset Natuna.
dan Inovasi Daerah Kabupaten

1.4. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah resmi diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah.

b. Fungsi dan kewenangan

Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi daerah;
- b. Pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan serta Riset dan Inovasi Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- f. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan inovasi, kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati. Sesuai tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- g. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



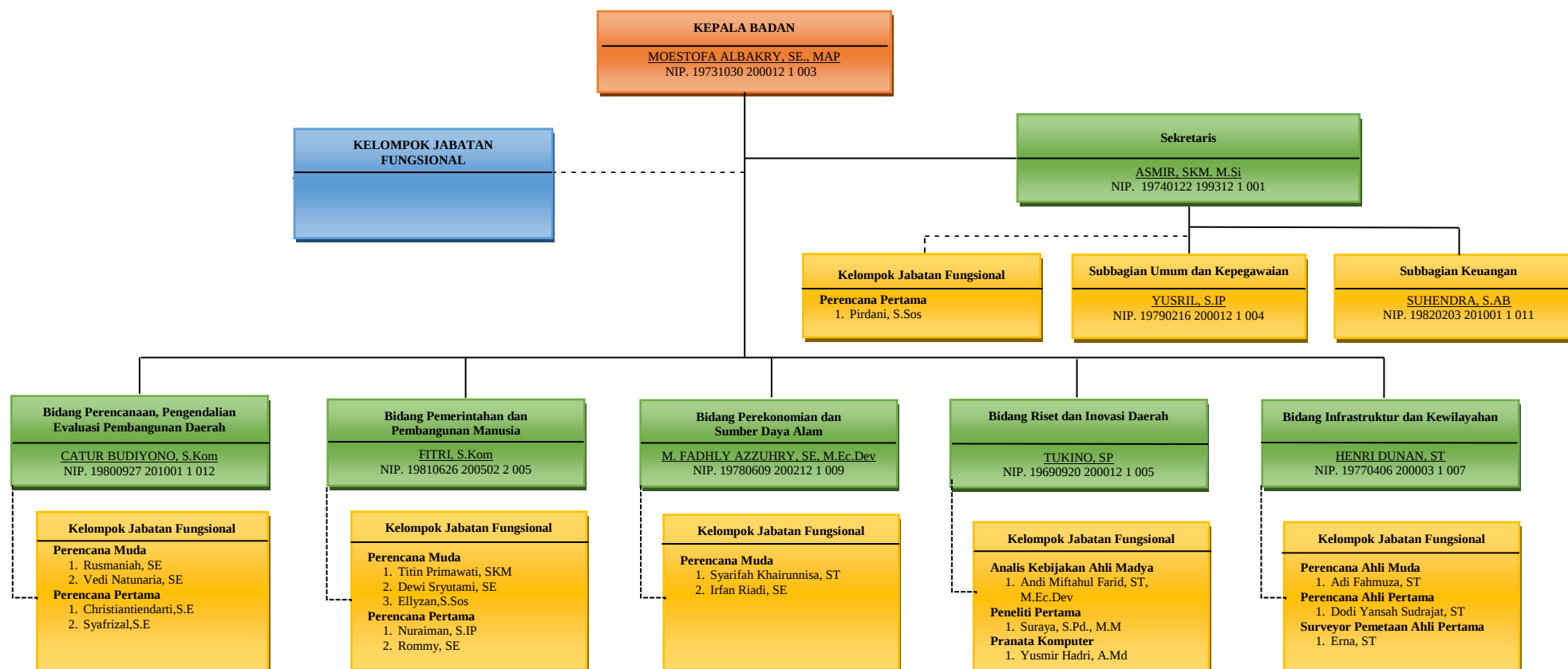
2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Gambar. 1.1
Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapperida Kabupaten Natuna

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TIPE A
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NATUNA
Nomor : 56 Tahun 2025
Tanggal : 16 Desember 2025





2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif (Executive summary)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Tentang cara pencapaian tujuan dan sasaran penetapan kinerja tahun 2025 yang menjadi acuan pengukuran kinerja yang berarti Renstra, Rencana Kerja (Renja), dan Penetapan Kinerja.

2.1. Rencana Strategis

Menguraikan tentang :

- 2.1.1. Visi dan Misi
- 2.1.2. Tujuan dan Sasaran
- 2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

BAB IV : PENUTUP

Dalam Bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian ini menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 dan menguraikan keberhasilan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja instansi serta saran yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

4.1 Kesimpulan

Lampiran :

- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- Cascading Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, yang mana Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan sebagaimana dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.



Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang
Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2025-
2045

Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah Tahun
2025-2029

Keputusan Kepala
Barenlitbangda
Nomor 42 Tahun
2025 tentang
Rencana Strategis
Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Kabupaten
Natuna Tahun
2025-2029



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

2.1.1. Visi dan Misi

Visi

Visi yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna merupakan telaahan dari visi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah:

***“Terwujudnya
Kabupaten Natuna
yang Makmur,
Berdaya Saing dan
Berbudaya”***

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2025-2029 tersebut adalah sebagai berikut:

❖ Makmur

Terwujudnya kehidupan masyarakat Kabupaten Natuna yang lebih layak dan sejahtera. Kondisi ini ditandai dengan (1) kesejahteraan ekonomi yang meliputi: peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan meningkatnya lapangan pekerjaan meningkat. (2) Kualitas hidup yang baik dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang memadai.

❖ Berdaya Saing

Kemampuan Kabupaten Natuna untuk bersaing secara efektif di tingkat regional dan nasional, dengan mengoptimalkan posisi strategis dan potensi daerah. Sebagai daerah perbatasan Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya secara optimal agar dapat berkembang dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan. Mengoptimalkan potensi daerah melalui mengembangkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata bahari, dan energi yang berkelanjutan, sehingga menjadi pusat ekonomi maritim yang kompetitif.

❖ Berbudaya

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

MISI

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut:

1

Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kabupaten Natuna.

2

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan dan Konektivitas Antar Pulau

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau, perbatasan, membangun beberapa sentra ekonomi antar kawasan dalam satu/inter Kabupaten Natuna guna mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir, karena masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat dan tidak merata.

3

Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Natuna. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan era-Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa beradaptasi, melakukan perbandingan dan bersaing dalam hal peningkatan keahlian dan kompetensi yang dimiliki.

4

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, berorientasi pelayanan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

5

Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam rangka memperkuat nilai-nilai keagamaan, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Nilai keagamaan dan budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna terletak di misi ke 4 (empat) yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”***. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki peranan dalam mewujudkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dan terwujudnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna yaitu:

Tabel 2.1
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025

MISI 4 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”				
Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Satuan	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah komponen Perencanaan	Hasil Evaluasi SAKIP Pemda oleh Kemenpanrb yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada komponen perencanaan	Nilai	24,32
	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Indeks	4,1

Tabel 2.2
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Penilaian IPPN Pemerintah Daerah pada komponen Sinergi, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.	Nilai	80
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai indeks diperoleh dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penilaian terhadap aspek inisiatif, implementasi, dan hasil inovasi yang	Nilai	43



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

		dilaksanakan daerah.		
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi LKjIP dari Inspektorat	Nilai	78,00	
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,10	

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*corebusiness*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah (PD) yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks Perencanaan adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas, keterpaduan, dan efektivitas proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Penilaian IPPN Pemerintah Daerah pada komponen Sinergi, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah	Nilai indeks diperoleh dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penilaian terhadap aspek inisiatif, implementasi, dan hasil inovasi yang dilaksanakan daerah.

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna menyusun Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna. Perjanjian kinerja ini disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Nilai	80,00
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	43,00

Selanjutnya, sasaran strategis dijabarkan ke dalam 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) subkegiatan yang saling mendukung dan terintegrasi. Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dilakukan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, indikator kinerja yang terukur, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya. Melalui



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan dimaksud, diharapkan pencapaian sasaran strategis dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Tabel 2.5
Program, Kegiatan dan Subkegiatan pendukung
Sasaran Strategis Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Nilai	80	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	87,5	1,303,864,498.00
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	88	1.126.160.878,00
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	1.126.160.878,00
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	%	67	177,703,620.00
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	177,703,620.00
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	%	64	220,102,503.00
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	%	90	42.613.289,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perencanaan Pembangunan Daerah				
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	42.613.289,00
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	55	177.489.214,00
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	177.489.214,00
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	93	74.492.560,00
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam RKPD	%	92	74.492.560,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	12.488.000,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)				
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	16.866.750,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	10.770.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	34.367.810,00
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	93	52.361.310,00
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian	%	92	52.361.310,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				dan SDA (Sumber Daya Alam)	dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD)			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	27.807.810,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	24.553.500,00
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	93	31.980.000,00
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	%	92	31.980.000,00
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang ikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	31.980.000,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	43,00	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	55	132,349,080.00
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	%	100	40.999.000,00
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1	40.999.000,00
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	100	91.350.080,00
				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	91.350.080,00
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rasio Produk Inovasi Yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,71	42.897.000,00
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	%	100	42.897.000,00
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	42.897.000,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	88,30	2.520.424,00
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	%	80	2.520.424,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.034.000,00
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	1.486.424,00
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,46	6,761,876,425.00
				Administrasi Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		5.735.813.209,00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	46	5.735.813.209,00
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	95	3.031.942,00
				Bimbingan Teknis Implementasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Orang	1	3.031.942,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	%	81	389.426.700,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	33.600.000,00
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	17.000.000,00
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	26.945.000,00
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1.500.000,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	310.381.700,00
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah	%	75	18.054.000,00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	18.054.000,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	%	100	354,324,000.00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.080.000,00
				Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	21.627.000,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	325.617.000,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	81	261,226,574,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	104.006.210,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	25.474.090,00
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	131.746.274,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merujuk pada hasil atau pencapaian yang diperoleh oleh sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas, mencapai tujuan, dan memenuhi target yang telah ditentukan. Capaian ini mencakup berbagai aspek yang mendefinisikan Keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi SKPD. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja tahun 2025 disesuaikan dengan Renstra dan RPJMD terbaru periode 2025–2029. Tahun 2025 merupakan masa transisi dari periode RPJMD 2021–2026 menuju RPJMD 2025–2029, demikian pula dengan periode Renstra. Kondisi tersebut menyebabkan adanya penyesuaian dan perubahan pada beberapa indikator kinerja, yang berdampak pada perbandingan dan realisasi capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja) perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penghitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh capaian indikator kinerja hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam tujuh kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Penilaian

No.	Kategori	Nilai	Kategori Capaian
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup Baik
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna terletak di misi ke 4 (empat) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”**. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna memiliki peranan dalam mewujudkan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dan terwujudnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Pencapaian kinerja tujuan diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui dua indikator Tujuan yang capaiannya diuraikan pada tabel berikut:

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah komponen Perencanaan	Nilai	24,32	24,04	98,84
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,1	4,02	98,04
		Nilai rata-rata capaian kinerja				98,44

Berdasarkan tabel 3.2, tujuan meningkatnya akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah berbasis pelayanan publik menunjukkan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 98,44%, yang berada pada kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah telah berjalan efektif dan didukung oleh kualitas pelayanan publik yang optimal.

Indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah komponen Perencanaan mencapai realisasi 24,04 dari target 24,32, dengan tingkat capaian 98,84%. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan dengan tingkat akuntabilitas yang sangat tinggi, khususnya dalam aspek keselarasan dokumen perencanaan, penganggaran, serta pengukuran dan pelaporan kinerja. Sementara itu, indikator Indeks Pelayanan Publik mencatat realisasi 4,02 dari target 4,1, dengan capaian sebesar 98,04%. Capaian yang hampir memenuhi target ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik telah berada pada tingkat yang sangat baik dan mampu mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja terhadap tujuan ini dapat dinilai sangat memuaskan. Ke depan, upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas perencanaan serta pelayanan publik tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar capaian yang tinggi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Selanjutnya untuk melihat perbandingan capaian kinerja tujuan

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

dari periode awal renstra sampai tahun 2025 disajikan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2022-2025

No.	Tujuan	Indikator	Satuan	Realisasi			
				2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah komponen Perencanaan	Nilai	-	23,92	24,04	24,04
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,48	3,23	3,44	4,02

Berdasarkan data Realisasi Capaian Kinerja Tujuan tahun 2022–2025, tujuan meningkatnya akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah berbasis pelayanan publik menunjukkan perkembangan kinerja yang positif. Pada indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah komponen Perencanaan, realisasi mulai tercatat pada tahun 2023 sebesar 23,92, meningkat menjadi 24,04 pada tahun 2024 dan tetap stabil pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah sekaligus konsistensi penerapan sistem perencanaan yang telah berjalan baik.

Sementara itu, indikator Indeks Pelayanan Publik mengalami fluktuasi pada periode 2022–2024, dari 3,48 pada tahun 2022 menurun menjadi 3,23 pada tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 3,44 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, indikator ini mengalami peningkatan signifikan menjadi 4,02, yang mengindikasikan adanya perbaikan nyata dalam kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, capaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah semakin selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas Nilai SAKIP serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar capaian positif ini dapat berkesinambungan. Selanjutnya untuk melihat capaian kinerja

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

tujuan pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir capaian renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan
Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	2025			Target akhir Renstra	Capaian terhadap Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah komponen Perencanaan	Nilai	24,32	24,04	98,84	26,12	92,03
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,1	4,02	98,04	4,5	89,33

Berdasarkan tabel, capaian kinerja tujuan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, baik jika dibandingkan dengan target tahun berjalan maupun terhadap target akhir Renstra 2025–2029, meskipun masih terdapat ruang peningkatan untuk mencapai target jangka menengah secara optimal.

Pada indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah komponen Perencanaan, realisasi tahun 2025 sebesar 24,04 atau 98,84% dari target tahunan (24,32). Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 26,12, capaian tahun 2025 telah mencapai 92,03%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah telah berada pada tingkat yang sangat baik dan relatif mendekati target akhir Renstra, sehingga pada periode selanjutnya diperlukan upaya penguatan berkelanjutan untuk menutup selisih capaian yang masih tersisa.

Sementara itu, indikator Indeks Pelayanan Publik mencatat realisasi sebesar 4,02 atau 98,04% dari target tahun 2025 (4,1). Namun, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 4,5, capaian tersebut baru mencapai 89,33%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kualitas pelayanan publik pada tahun 2025 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, peningkatan mutu pelayanan masih perlu terus didorong melalui



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

perbaikan standar layanan, inovasi pelayanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian target akhir Renstra 2025–2029. Fokus kebijakan ke depan perlu diarahkan pada upaya akselerasi peningkatan kinerja, khususnya pada indikator Indeks Pelayanan Publik, agar seluruh target Renstra dapat dicapai secara optimal pada akhir periode perencanaan.

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui empat indikator sasaran, dari empat indikator tersebut terdapat dua indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025. Capaian kinerja sasaran diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Nilai	80,00	79,00	98,75
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	43,00	45,35	100,00
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	76,90	98,59
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	4,10	4,02	98,05
Rata-rata capaian kinerja						100,21

Berdasarkan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025-2029, terdapat dua sasaran dan empat



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

indikator sasaran, namun berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025, terdapat dua indikator sasaran yang menjadi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yaitu **Indeks Perencanaan dan Indeks Inovasi Daerah**.

SASARAN 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

INDEKS PERENCANAAN

1) Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Tahun 2025

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) merupakan instrument yang digunakan untuk mengukur Kualitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah. Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini dilakukan oleh pemerintah pusat hanya untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tingkat provinsi. Sementara itu, perhitungan IPPN untuk Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pemerintah daerah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Kriteria yang digunakan untuk mengukur IPPN untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN)
Pemerintah Daerah

No	Komponen	Sub-Komponen	Dokumen yang dinilai
1	Sinergi	Keselarasan dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN	RPJMD
		Keselarasan dokumen RKPD dengan RKP	RKPD
		Kesesuaian Anggaran Daerah dalam	



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

No	Komponen	Sub-Komponen	Dokumen yang dinilai
		kontribusinya terhadap Program Prioritas Nasional di daerah	
2	Kualitas Perencanaan	Kesesuaian prioritas daerah dengan isu daerah	
		Kesesuaian target dan sasaran dalam menyelesaikan prioritas daerah dan isu daerah	
		Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek untuk mencapai target dan sasaran	
		Inovasi Perencanaan Pembangunan	
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Dengan Perencanaan Kinerja	Target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait	RKPD-Renstra PD

Berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka hasil perhitungan Indeks Perencanaan pembangunan sebagaimana sebagai berikut:

Gambar 3.1
Indeks Perencanaan Kabupaten Natuna
Tahun 2025





2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

Berdasarkan gambar diatas, capaian Indeks Perencanaan tahun 2025 adalah 98,75%, dengan realisasi 79,00 poin dari target 80,00 poin, yang menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah telah berjalan baik dan efektif, didukung oleh pelaksanaan program perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, disertai dengan efisiensi anggaran sebesar 17,70% atau Rp 297.920.775. Bukti hasil perhitungan Indeks Perencanaan Tahun 2025 dapat diakses melalui <https://bit.ly/IndeksPerencanaanNatuna2025>

2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun sebelumnya

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bapperida Kabupaten Natuna, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan capaian kinerja Indeks Perencanaan pada tahun 2025 dan tahun sebelumnya, sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan Renstra Bapperida Tahun 2025-2029, sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”, dengan indikator sasaran Indeks Perencanaan, realisasi 79,00 point.
- b) Pada tahun 2022-2024 mengacu pada dokumen Renstra Bapperida Tahun 2021-2026, sasaran “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”, indikator sasaran Indeks Kualitas Perencanaan, dengan realisasi 6,7 point pada tahun 2022, 7,6 point pada tahun 2023, dan 7,8 point pada tahun 2024. Terdapat perbedaan skala pada penilaian Indeks tersebut yang mana pada tahun 2025 dengan skala penilaian 1-100 sedangkan pada tahun sebelumnya dengan skala 1-10.

Adapun perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya tahun 2022-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Tabel 3.7
Perbandingan Indeks Perencanaan tahun 2025
dengan tahun sebelumnya tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun				Ket.
			2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Perencanaan (IKU Renstra 2025-2029)	Nilai	-	-	-	79,00	
2	Indeks Kualitas Perencanaan (IKU Renstra 2021-2026)	Nila	6,7	7,8	7,9	-	

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra

Realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra untuk melihat dan mengukur capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029. Adapun sandingan antara capaian kinerja Indeks Perencanaan tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Indeks Perencanaan tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
Realisasi	79,00	-	-	-	-	-
Capaian Kinerja Tahun dilaporkan	98,75%					
Realisasi Kinerja Tahun ini terhadap Target Akhir Renstra	94,05%					

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Perencanaan pada tahun 2025 sebesar 79,00 poin dari target 80,00 poin, sehingga menghasilkan capaian kinerja tahun yang dilaporkan sebesar 98,75%, sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra tahun 2030 sebesar 84,00 poin, realisasi kinerja tahun ini telah mencapai 94,05%, yang

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

menunjukkan bahwa capaian kinerja berada pada jalur yang sesuai untuk mendukung pencapaian target akhir Renstra.

4) Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional

Capaian Indikator Indeks Perencanaan Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Kinerja Indeks Perencanaan Kabupaten Natuna
Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

No.	Nasional/Prov/ Kab	Indeks Perencanaan			
		2022	2023	2024	2025
1	Nasional	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Provinsi Kep. Riau	n.a	n.a	n.a	n.a
3	Kabupaten Natuna	6,7	7.6	7,8	79,00

Berdasarkan perbandingan Indeks Perencanaan, data pada tingkat nasional dan Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2022–2025 belum tersedia (n.a), sehingga analisis komparatif hanya dapat dilakukan pada tingkat Kabupaten Natuna, yang menunjukkan kecenderungan peningkatan kinerja dari tahun ke tahun, yaitu dari 6,7 pada tahun 2022, meningkat menjadi 7,6 pada tahun 2023, 7,8 pada tahun 2024 (menggunakan skala penilaian 1–10), dan pada tahun 2025 mencapai 79,00 (menggunakan skala penilaian 1–100), yang mengindikasikan adanya peningkatan signifikan kualitas perencanaan pembangunan daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

5) Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Kinerja

Selain disampaikan capaian kinerja tahun 2025 pada penjelasan sebelumnya, disampaikan pula analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Indeks Perencanaan Kabupaten Natuna Tahun 2025. Berikut disampaikan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja Indeks Perencanaan Tahun 2025, yaitu:

Faktor Pendorong, Bapperida Kabupaten Natuna dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada kinerja Indeks Perencanaan didukung oleh beberapa faktor diantaranya:



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

- a. Selain menggunakan aplikasi nasional SIPD-RI sebagai sistem perencanaan yang ditetapkan secara nasional, Pemerintah Kabupaten Natuna juga memanfaatkan aplikasi perencanaan pembangunan daerah (e-Planning) milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi mulai dari RPJMD, Renstra, hingga Renja, serta disinkronkan dengan tahapan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten, sehingga proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan selaras antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
- b. Penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah telah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi, yang diwujudkan melalui penyelarasan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja, dan RKPD dengan arah kebijakan, sasaran, serta prioritas pembangunan nasional dan Provinsi, sehingga perencanaan pembangunan daerah tersusun secara konsisten, terintegrasi, dan selaras antar jenjang pemerintahan.

Faktor Penghambat, Bapperida Kabupaten Natuna dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada kinerja Indeks Perencanaan dipengaruhi oleh:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kelengkapan data pendukung perencanaan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman perangkat daerah terhadap metodologi dan indikator perencanaan pembangunan.
- c. Belum sepenuhnya isu-isu strategis daerah menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan pembangunan.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan ke depan dalam rangka pencapaian kinerja kelembagaan secara optimal antara lain:

- a. Penguatan kualitas dan integrasi data perencanaan, melalui peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, pemutakhiran data sektoral, serta optimalisasi pemanfaatan sistem e-Planning dan SIPD-RI sebagai basis data perencanaan terpadu.
- b. Peningkatan kapasitas dan keseragaman pemahaman SDM perencanaan, melalui pembinaan teknis, bimbingan teknis, dan penguatan peran



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

Bapperida dalam memastikan penerapan metodologi dan indikator perencanaan pembangunan yang berbasis kinerja.

- c. Penajaman dan pengarusutamaan isu-isu strategis daerah, dengan mengoptimalkan proses perumusan isu strategis pada setiap tahapan perencanaan serta menjadikannya dasar dalam penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.

6) Program Pendukung

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis Bapperida Kabupaten Natuna yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, didukung oleh program yang ada di Bapperida Kabupaten Natuna, yaitu:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:
 - Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah, dari target 87,5% telah terealisasi 83,33%, dengan capaian 95,24%.
 - Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir, dari target 64,00% telah terealisasi 86,70%, dengan capaian 100,00%.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu:
 - Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dari target 93,00% telah terealisasi 98,68%, dengan capaian 100,00%.
 - Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dari target 93,00% telah terealisasi 98,75%, dengan capaian 100,00%.
 - Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dari target 93,00% telah terealisasi 98,68%, dengan capaian 100.00%.

7) Efisiensi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2025



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

sebagai penunjang pencapaian indikator sasaran yaitu sebesar Rp 1.682.800.871,- Pada akhir tahun 2025, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.384.880.096,- atau sebesar 82,30% dari pagu yang telah dianggarkan. Adapun efisiensi anggaran dari indikator kinerja Indeks Perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Perencanaan
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi	Program Pendukung
1	Indeks Perencanaan	1.682.800.871	1.384.880.096	17,70%	- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

SASARAN 2

Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

INDEKS INOVASI DAERAH

1) Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025

Indeks Inovasi Daerah merupakan laporan informasi data inovasi daerah yang disusun berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan melalui proses *quality control* oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) *Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and*



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Technology (SMART CITY) Universitas Indonesia serta Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025, Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebesar **45,35**. Skor tersebut menempatkan Kabupaten Natuna dalam kategori **Inovatif**.

Gambar 3.2
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2025



Berdasarkan gambar diatas, capaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 mencapai 100,00%, dengan realisasi 45,35 dari target 43,00, yang menunjukkan peningkatan kinerja dan layanan publik perangkat daerah melalui dukungan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah serta didukung efisiensi anggaran sebesar 76,04% atau Rp 133.261.207. Bukti hasil perhitungan Indeks Perencanaan Tahun 2025 dapat diakses melalui <https://bit.ly/IndeksInovasiDaerahNatuna2025>

2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun sebelumnya

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bapperida Kabupaten Natuna, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

Adapun perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya tahun 2022-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Indeks Inovasi daerah
tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun				Ket.
			2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	n.a	37,10	42,83	45,35	

Perkembangan capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Realisasi Indeks Inovasi Daerah mengalami peningkatan berkelanjutan, yaitu dari 37,10 pada tahun 2023, meningkat menjadi 42,83 pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 45,35 pada tahun 2025, sementara pada tahun 2022 data belum tersedia (*n.a*). Peningkatan skor Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2025 tersebut mencerminkan adanya perbaikan pada beberapa aspek utama dalam penilaian inovasi daerah, yang menunjukkan semakin meningkatnya kinerja inovasi di Kabupaten Natuna.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra

Realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra untuk melihat dan mengukur capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029. Adapun sandingan antara capaian kinerja Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana pada tabel berikut:



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Tabel 3.12
Perbandingan Indeks Inovasi Daerah tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target	43,00	43,00	44,00	45,00	46,00	47,00
Realisasi	45,35	-	-	-	-	-
Capaian Kinerja Tahun dilaporkan	105,46%					
Realisasi Kinerja Tahun ini terhadap Target Akhir Renstra	96,49%					

Realisasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 sebesar 45,35 telah melampaui target tahun 2025 sebesar 43,00, dengan capaian kinerja 105,46%, sedangkan apabila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra tahun 2029 sebesar 47,00, realisasi kinerja tahun ini telah mencapai 96,49%, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja berada pada jalur yang tepat untuk mendukung pencapaian target akhir Renstra.

4) Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional

Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna
Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional

No.	Nasional/Prov/ Kab	Indeks Inovasi Daerah			
		2022	2023	2024	2025
1	Nasional	n.a	n.a	n.a	n.a
2	Provinsi Kep. Riau	n.a	43,83	50,33	52,85
3	Kabupaten Natuna	n.a	37,10	42,87	45,35

Berdasarkan perbandingan Indeks Inovasi Daerah, data tingkat nasional pada periode 2022–2025 belum tersedia (*n.a*), sedangkan pada tingkat Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren peningkatan dari 43,83 pada tahun 2023, menjadi 50,33 pada tahun 2024, dan 52,85 pada tahun 2025; sementara itu, Kabupaten Natuna juga mengalami peningkatan kinerja inovasi daerah dari



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

37,10 pada tahun 2023, meningkat menjadi 42,87 pada tahun 2024, dan mencapai 45,35 pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja inovasi daerah secara berkelanjutan, meskipun capaian Kabupaten Natuna masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Kepulauan Riau.

5) Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Kinerja

Selain disampaikan capaian kinerja tahun 2025 pada penjelasan sebelumnya, disampaikan pula analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025. Berikut disampaikan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025, yaitu:

Faktor Pendorong, Bapperida Kabupaten Natuna dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada kinerja Indeks Inovasi Daerah didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. adanya komitmen pimpinan daerah dalam mendorong pelaksanaan inovasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dukungan pimpinan daerah menjadi factor penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi lahirnya inovasi.
- b. meningkatnya partisipasi OPD dalam mengusulkan dan melaksanakan inovasi. OPD mulai melihat inovasi sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan menjawab permasalahan pelayanan yang dihadapi.
- c. adanya upaya perbaikan dalam aspek administrasi dan pelaporan inovasi. Dokumentasi inovasi yang lebih sistematis berkontribusi positif terhadap penilaian IID.

Faktor Penghambat, Di balik capaian yang diperoleh, pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Natuna masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya:

- a. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan inovasi daerah.
- b. Keterbatasan anggaran daerah, yang mempengaruhi kemampuan perangkat daerah dalam mengembangkan inovasi yang lebih kompleks, berkelanjutan, dan berdampak luas.



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

- c. Kondisi geografis Kabupaten Natuna sebagai daerah kepulauan, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan, pendampingan, dan replikasi inovasi.
- d. Belum meratanya budaya inovasi di seluruh perangkat daerah, dimana sebagian inovasi masih bergantung pada inisiatif individu atau kelompok tertentu, sehingga keberlanjutan inovasi perlu diperkuat melalui sistem dan kebijakan yang lebih mapan.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan ke depan dalam rangka pencapaian kinerja kelembagaan secara optimal antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas SDM dan penguatan budaya inovasi, melalui pelatihan, pendampingan, serta pembinaan berkelanjutan agar inovasi dapat berkembang secara merata di seluruh perangkat daerah dan tidak bergantung pada individu tertentu.
- b. Penguatan kebijakan, sistem, dan koordinasi inovasi daerah, termasuk penyusunan regulasi pendukung, optimalisasi mekanisme pembinaan, serta peningkatan kolaborasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
- c. Optimalisasi dukungan anggaran dan pemanfaatan sumber daya, dengan mendorong pengelolaan anggaran yang efektif, pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif, serta penyesuaian strategi pelaksanaan inovasi terhadap kondisi geografis daerah kepulauan.

6) Program Pendukung

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis Bapperida Kabupaten Natuna yaitu Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah, didukung oleh program yang ada di Bapperida Kabupaten Natuna, yaitu:

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:
 - Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah, dari target 55,00% telah terealisasi 0,00%, dengan capaian 0,00%.

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

- Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah, dari target 0,71 telah terealisasi 0,76, dengan capaian 100,00%.

Pada indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah, capaian kinerja belum terealisasi dikarenakan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan masih memerlukan proses sinkronisasi dan penyesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta prioritas perangkat daerah, sehingga belum seluruhnya dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

8) Efisiensi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian indikator sasaran Indeks Inovasi Daerah yaitu sebesar Rp 175.246.080,- Pada akhir tahun 2025, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 41.984.873,- atau sebesar 23,96% dari pagu yang telah dianggarkan. Adapun efisiensi anggaran dari indikator kinerja Indeks Inovasi Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Inovasi Daerah
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi	Program Pendukung
1	Indeks Inovasi Daerah	175.246.080	41.984.873	76,04%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

SASARAN 2

Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH

1) Capaian Nilai Sakip Perangkat Daerah Daerah Tahun 2025

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan hasil penilaian atas tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang menggambarkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan laporan hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024, menyimpulkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna telah mengimplementasikan SAKIP dan telah menghasilkan dokumen-dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku dan berdasarkan hasil akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 memperoleh nilai sebesar nilai **76,90 (tujuh puluh enam koma sembilan puluh) dengan predikat “BB” (Sangat Baik)**.

Gambar 3.3
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025





2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 mencapai 98,59%, dengan realisasi 76,90 dari target 78,00, yang mencerminkan kinerja akuntabilitas perangkat daerah yang cukup baik dalam mendukung peningkatan kinerja dan layanan publik, serta didukung efisiensi anggaran sebesar 79,44% atau Rp 2.002.212. Laporan hasil Evaluasi Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna dapat diakses melalui <https://bit.ly/LHESakipBapperida2024>

2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun sebelumnya

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bapperida Kabupaten Natuna, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun sandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya tahun 2022-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan Nilai Sakip Perangkat Daerah
tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun				Ket.
			2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	82,82	73,45	78,70	76,90	

Perkembangan Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada periode 2022–2025 menunjukkan dinamika capaian kinerja, dimana nilai SAKIP pada tahun 2022 sebesar 82,82, mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 73,45, kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 78,70, dan pada tahun 2025 mencapai 76,90, yang mengindikasikan bahwa meskipun terjadi fluktuasi capaian kinerja, akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara umum masih berada pada kategori sangat baik, namun tetap memerlukan upaya penguatan berkelanjutan untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas penerapan SAKIP di seluruh perangkat daerah.

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra

Realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra untuk melihat dan mengukur capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029. Adapun sandingan antara capaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target	78,00	78,00	79,50	80,00	80,00	80,00
Realisasi	76,90	-	-	-	-	-
Capaian Kinerja Tahun dilaporkan	98,59%					
Realisasi Kinerja Tahun ini terhadap Target Akhir Renstra	96,12%					

Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 sebesar 76,90 belum sepenuhnya mencapai target tahun 2025 sebesar 78,00, dengan capaian kinerja 98,59%, namun apabila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra sebesar 80,00, realisasi kinerja tahun ini telah mencapai 96,12%, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja SAKIP berada pada jalur yang mendekati target akhir Renstra dan masih memerlukan penguatan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

4) Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Kinerja

Selain disampaikan capaian kinerja tahun 2025 pada penjelasan sebelumnya, disampaikan pula analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut disampaikan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025, yaitu:



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

Faktor Pendorong, Bapperida Kabupaten Natuna dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP secara konsisten sebagai bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.
- b. Dukungan sistem, regulasi, dan program penunjang, yang mendukung peningkatan kualitas penerapan SAKIP.

Faktor Penghambat, Bapperida Kabupaten Natuna dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada Nilai SAKIP Perangkat Daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya:

- a. Belum meratanya pemahaman dan kapasitas dalam penerapan SAKIP, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja berbasis hasil.
- b. Kualitas dan konsistensi data kinerja yang belum optimal, sehingga masih memerlukan penyempurnaan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja.
- c. Belum sepenuhnya selarasnya perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, yang berdampak pada efektivitas penerapan SAKIP secara menyeluruh di perangkat daerah.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan ke depan dalam rangka pencapaian kinerja kelembagaan secara optimal antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas dan keseragaman pemahaman perangkat daerah melalui pembinaan, pendampingan, dan evaluasi berkala terhadap penerapan SAKIP.
- b. Penguatan kualitas data kinerja serta penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, agar implementasi SAKIP lebih konsisten dan berbasis hasil.

5) Program Pendukung

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis Bapperida Kabupaten Natuna yaitu Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, didukung oleh program yang ada di Bapperida Kabupaten Natuna, yaitu:



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu:
 - Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah, dari target 88,30% telah terealisasi 100,00%, dengan capaian 113,25%.

6) Efisiensi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah yaitu sebesar Rp 2.520.424,- Pada akhir tahun 2025, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 518.212,- atau sebesar 20,56% dari pagu yang telah dianggarkan. Adapun efisiensi anggaran dari indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi	Program Pendukung
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.520.424	518.212	79,44%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN 2

Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah

INDEKS PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH

1) Capaian Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2025

Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah, yang dinilai berdasarkan pemenuhan standar pelayanan, efektivitas proses pelayanan, kepuasan masyarakat, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pelayanan



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

publik yang prima, transparan, dan akuntabel. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-315 Tahun 2025 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4.02 dengan Kategori Sangat Baik.

Gambar 3.4
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2025



Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 mencapai 98,05%, dengan realisasi 4,02 dari target 4,10, yang mencerminkan peningkatan kinerja dan kualitas layanan publik perangkat daerah, didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta efisiensi anggaran sebesar 2,85% atau Rp 192.780.438.

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

2) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun sebelumnya

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bapperida Kabupaten Natuna, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun sandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya tahun 2022-2024 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun				Ket.
			2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	(n.a)	(n.a)	(n.a)	4,02	

Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,02, sementara pada tahun 2022 hingga 2024 data belum tersedia (n.a). Capaian tahun 2025 ini menjadi baseline awal dalam pengukuran kinerja pelayanan publik perangkat daerah di Kabupaten Natuna, sekaligus menggambarkan kondisi awal kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang ke depan dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

3) Perbandingan Realisasi dengan Target Akhir Renstra

Realisasi kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra untuk melihat dan mengukur capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029. Adapun sandingan antara capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah tahun 2025 dengan target Renstra tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

Tabel 3.19
Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Uraian	Tahun					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Target	4,10	4,10	4,15	4,20	4,25	4,30
Realisasi	4,02	-	-	-	-	-
Capaian Kinerja Tahun dilaporkan	98,05%					
Realisasi Kinerja Tahun ini terhadap Target Akhir Renstra	93,49%					

Capaian Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 tercatat sebesar 4,02, dengan target tahun berjalan sebesar 4,10. Dengan capaian tersebut, tingkat capaian kinerja tahun yang dilaporkan mencapai 98,05 %, yang menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik perangkat daerah telah mendekati target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025–2029, realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 telah mencapai 93,49 % dari target akhir Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun target tahun berjalan belum sepenuhnya tercapai, kinerja pelayanan publik perangkat daerah berada pada jalur yang positif dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

4) Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Kinerja

Selain disampaikan capaian kinerja tahun 2025 pada penjelasan sebelumnya, disampaikan pula analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut disampaikan hasil analisis keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian kinerja Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2025, yaitu:

Faktor Pendorong, Bapperida Kabupaten Natuna dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada kinerja Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah didukung oleh beberapa faktor diantaranya:



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

- a. Komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan, pemantauan kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan publik.
- b. Dukungan kebijakan dan regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, termasuk berpedoman pada ketentuan Kementerian PANRB dan kebijakan daerah terkait reformasi birokrasi.
- c. Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah, baik melalui penguatan kelembagaan, tata kelola, maupun pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.

Faktor Penghambat, Bapperida Kabupaten Natuna dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya:

- a. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman terhadap instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Kendala sarana prasarana dan dukungan teknologi informasi, terutama dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan ke depan dalam rangka pencapaian kinerja kelembagaan secara optimal antara lain:

- a. Peningkatan kualitas dan pemerataan standar pelayanan publik, melalui pembinaan, pendampingan, serta evaluasi berkala terhadap penerapan standar pelayanan di seluruh perangkat daerah.
- c. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan publik, melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan pemahaman terhadap instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik.
- d. Optimalisasi sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengembangan layanan berbasis digital

5) Program Pendukung

Dalam mendukung capaian kinerja pada sasaran strategis Bapperida Kabupaten Natuna yaitu Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

Daerah dengan Indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah, didukung oleh program yang ada di Bapperida Kabupaten Natuna, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dari target 3,46 telah terealisasi 3,30, dengan capaian 95,38%.

6) Efisiensi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian indikator sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2025 sebagai penunjang pencapaian indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah yaitu sebesar Rp 6.761.876.425,- Pada akhir tahun 2025, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.569.095.987,- atau sebesar 97,15% dari pagu yang telah dianggarkan. Adapun efisiensi anggaran dari indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi	Program Pendukung
1	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	6.761.876.425	6.569.095.987	2,85%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.3 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 30 (tiga puluh) subkegiatan. Semua Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dilakukan evaluasi dan pengukuran kinerja atas pelaksanaannya. Tujuan pengukuran kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan adalah untuk menilai sejauh mana suatu program atau aktivitas mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

penggunaan sumber daya yang ada, untuk melihat capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Natuna tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	87,5	83,33	95,24
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	88	96,90	100,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	4	4	100,00
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	%	67	76,86	100,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	100,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	%	64	86,67	100,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	%	90	98,93	100,00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	3	100,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	55	100	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	100,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	93	96,86	100,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam RKPD	%	92	92	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8	100,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	8	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	100,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	93	98,75	100,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD	%	92	92	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	5	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Dokumen	5	5	100,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	93	98,68	100,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	%	92	82,35	89,51
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang ikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100,00
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	55	0	0,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	%	100	50	50,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1	100,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	100	50	50,00
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	1	100,00
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rasio Produk Inovasi Yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,71	0,76	100,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	%	100	40,43	40,43
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	88,30	100	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	%	80	66,67	83,34



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,46	3,30	95,38
Administrasi Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	46	46	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	95	47,83	50,35
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	%	81	76,30	94,20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	47	78,33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah	%	75	77,64	100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	%	100	75	75,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	81	23,44	28,94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	100,00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0,00

Beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 masih terdapat capaian kinerja di bawah 70%, yang mengindikasikan masih adanya kendala baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun dukungan sumber daya. Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan tersebut yang capaiannya dibawah 70% diantaranya adalah:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan landasan implementasi pembangunan daerah (0%) belum terealisasi. Hal ini disebabkan hasil kelitbangan yang dihasilkan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah, serta masih terbatasnya mekanisme yang mewajibkan pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan.
- Pemanfaatan hasil kelitbangan pada bidang pemerintahan serta sosial dan kependudukan (masing-masing 50%) menunjukkan bahwa hasil penelitian belum optimal digunakan oleh perangkat daerah terkait, baik karena keterbatasan pemahaman, belum sinkronnya waktu penelitian



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

dengan siklus perencanaan, maupun belum kuatnya komitmen lintas OPD dalam mengimplementasikan rekomendasi hasil kajian.

- Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi daerah (40,43%) masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum meratanya budaya inovasi di seluruh perangkat daerah, keterbatasan kapasitas SDM dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi, serta minimnya pendampingan teknis dan insentif bagi OPD untuk mengembangkan inovasi yang berkelanjutan.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Persentase realisasi kinerja perangkat daerah (66,67%) belum mencapai target, yang mencerminkan masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan, serta perlunya penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja internal.
- Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah (50,35%) menunjukkan masih terbatasnya efektivitas pelayanan administrasi, yang dipengaruhi oleh keterbatasan SDM, sistem administrasi yang belum optimal, serta tingginya beban kerja administratif.
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (0%) tidak terealisasi, dikarenakan sub kegiatan tersebut dianggarkan pada tahun 2025 untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2024.
- Pemeliharaan barang milik daerah (28,94%) menunjukkan adanya keterbatasan dukungan anggaran serta penyesuaian skala prioritas belanja, sehingga pemeliharaan aset dan layanan penunjang belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (0%) tidak terealisasi dikarenakan sub kegiatan tersebut dianggarkan pada tahun 2025 untuk pembayaran hutang kegiatan tahun 2024.

Untuk melihat sejauhmana capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah perlu adanya perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target akhir renstra. Adapun



2025

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

perbandingan Realisasi kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022-2025 disajikan sebagaimana pada tabel berikut:



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Tabel 3.22
Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2022-2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	-	-	-	83,33
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKP	%	89,48	85,4	98,71	96,90
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP)	Dokumen	2	2	4	4
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKP	%	-	-	-	76,86
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	2	2
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	%	64,29	66,52	83,33	86,67
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	%	97,86	97,86	98,93	98,93
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	3	3	3
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	64,29	80	90	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	4	4



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	90,91	84,42	100	96,86
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam RKPD	%	-	-	-	92
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8	8	8
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	8	8	8
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	8	8	8
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	1	1	1
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	-	-	-	98,75
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD	%	-	-	-	92
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	5	5	5	5



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	3	3
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	-	-	-	98,68
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	%	-	-	-	82,35
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang ikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	3	3
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	-	-	-	0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	%	100	100	100	50
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1	1	1	1
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	-	-	-	50
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	-	-	-	1
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rasio Produk Inovasi Yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan	Rasio	-	-	-	0,76



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Badan Usaha di Daerah					
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	%	-	-	-	40,43
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	1	1	1
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	-	-	-	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	%	90,50	100	94,87	66,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				3
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan				3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	-	-	3,30
Administrasi Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	45	43	42	46
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	-	-	69,04	47,83
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	-	-	4	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	%	-	-	-	76,30



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12	12	12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	0	1	1
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	67	60	85	47
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah	%	-	-	-	77,64
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	14	25	1
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	%	-	-	-	75
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	-	-	-	23,44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	5	5
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	5	5	5	10



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun			
			2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	Dipelihara					
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	1	0



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Berdasarkan tabel Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2025, secara umum capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hanya saja ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak ada realisasi pada tahun sebelumnya karena menyesuaikan indikator kinerja renstra tahun 2025-2029. Selanjutnya untuk melihat Perbandingan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Tahun 2025 dengan target akhir Renstra

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	92	83,33	90,57
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	%	92	96,90	100,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	15	4	26,67
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	%	74	76,86	100,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	8	2	25,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	%	68	86,67	100,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	%	95	98,93	100,00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan	Dokumen	12	3	25,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Daerah)				
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	%	75	100	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	24	4	16,67
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	94	96,86	100,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam RKPD	%	96	92	95,83
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	48	8	16,67
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	48	8	16,67
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	48	8	16,67
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	1	16,67
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	94	98,75	100,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian	%	93	92	98,92



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
dan SDA (Sumber Daya Alam)	dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD)				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	30	5	16,67
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	30	5	16,67
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	94	98,68	100,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	%	96	82,35	85,78
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang ikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	30	3	10,00
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	70	0	0,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	%	100	50	50,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	6	1	16,67
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	100	50	50,00
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	6	1	16,67
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rasio Produk Inovasi Yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0,75	0,76	100,00
Pengembangan Inovasi	Persentase Perangkat Daerah	%	100	40,43	40,43



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
dan Teknologi	yang menerapkan Inovasi Daerah				
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	6	1	16,67
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	88,50	100	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	%	85	66,67	78,43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	18	3	16,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	3	16,67
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,50	3,30	94,28
Administrasi Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	50	46	92,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	95	47,83	50,34
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	%	85	76,30	89,76
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	72	12	16,67
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	72	12	16,67
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	72	12	16,67
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	1	16,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	70	47	64,14



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsultasi SKPD	SKPD				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah	%	85	77,64	91,34
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26	1	3,84
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	%	100	75	75,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	12	16,67
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	12	16,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	12	16,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	85	23,44	25,57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	10	33,33
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0,00

3.1.4 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya adalah proses yang dilakukan untuk menilai sejauh mana organisasi menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan seefisien mungkin, tanpa pemborosan, agar organisasi dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya dan usaha yang minimal.

Jumlah belanja langsung Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna sebesar Rp. 8.622.443.800,00

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

dialokasikan untuk mendukung empat indikator sasaran strategis, dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.996.479.168,00 atau 92,74 %, Untuk melihat tingkat Efisiensi penggunaan sumber daya capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pencapaian Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	1.523.967.001,00	1.314.049.711,00	17,70
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	175.246.080,00	41.984.873,00	76,04
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.520.424,00	518.212,00	79,44
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	6.761.876.425,00	6.569.987,00	2,85
Jumlah			8.622.443.800,00	7.996.479.168,00	7,26

Secara umum, pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna menunjukkan adanya efisiensi belanja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, meskipun tingkat efisiensi antar indikator masih bervariasi. Secara keseluruhan, total anggaran sebesar Rp8.622.443.800,00 direalisasikan sebesar Rp7.996.479.168,00 dengan tingkat efisiensi 7,26%. Kondisi ini mencerminkan bahwa secara agregat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna telah melaksanakan anggaran secara cukup efisien, namun tetap diperlukan penajaman perencanaan anggaran berbasis kinerja, agar efisiensi yang dicapai selaras dengan peningkatan kualitas output dan outcome, khususnya pada indikator yang membutuhkan dukungan anggaran besar seperti pelayanan publik dan penguatan inovasi daerah.



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396), alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebesar Rp 13.876.934.648,00 (Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang bersifat strategis dilakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 447), anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengalami perubahan penurunan menjadi Rp 8.622.443.800,00 (Delapan milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Tabel 3.25
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	1,303,864,498.00	1.200.904.362,00	92,10
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	1.126.160.878,00	1.080.977.857,00	95,99
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1.126.160.878,00	1.080.977.857,00	95,99
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Musrenbang Kabupaten yang diakomodir dalam RKPD	177,703,620.00	119.926.505,00	67.49
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	177,703,620.00	119.926.505,00	67.49
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	220,102,503.00	113.145.349,00	51,41
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	42.613.289,00	14.360.620,00	33,70
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan	42.613.289,00	14.360.620,00	33,70



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Daerah)			
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	177.489.214,00	98.784.729,00	55,66
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	177.489.214,00	98.784.729,00	55,66
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	74.492.560,00	41.148.188,00	55,24
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam RKPD	74.492.560,00	41.148.188,00	55,24
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.488.000,00	0	0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	16.866.750,00	16.866.750,00	100,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.770.000,00	3.975.000,00	36,91
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	34.367.810,00	17.191.000,00	50,02
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	52.361.310,00	17.799.451,00	33,99
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang diakomodir dalam RKPD)	52.361.310,00	17.799.451,00	33,99
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27.807.810,00	0	0,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.553.500,00	17.799.451,00	72,49
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang	31.980.000,00	11.882.746,00	37,16



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembangunan Daerah	Infrastruktur dan Kewilayahan			
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Subkegiatan yang dikoordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	31.980.000,00	11.882.746,00	37,16
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang ikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.980.000,00	11.882.746,00	37,16
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	132,349,080,00	14.402.873,00	10,88
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	40.999.000,00	4.039.088,00	9,85
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	40.999.000,00	4.039.088,00	9,85
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	91.350.080,00	10.363.785,00	11,35
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	91.350.080,00	10.363.785,00	11,35
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rasio Produk Inovasi Yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	42.897.000,00	27.582.000,00	64,30
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Inovasi Daerah	42.897.000,00	27.582.000,00	64,30
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	42.897.000,00	27.582.000,00	64,30
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.520.424,00	518.212,00	20,56
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2.520.424,00	518.212,00	20,56
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.034.000,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.486.424,00	518.212,00	34,86
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	6,761,876,425,00	6.569.095.987,00	97,15
Administrasi Keuangan	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.735.813.209,00	5.673.897.690,00	98,92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.735.813.209,00	5.673.897.690,00	98,92
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	3.031.942,00	0	0,00



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.031.942,00	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan operasional administrasi umum perkantoran	389.426.700,00	310.266.628,00	79,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33.600.000,00	28.707.042,00	85,44
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26.945.000,00	20.753.840,00	77,02
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.500.000,00	550.000,00	36,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.381.700,00	243.255.746,00	78,37
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan barang milik perangkat daerah	18.054.000,00	14.269.620,00	79,04
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18.054.000,00	14.269.620,00	79,04
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan perkantoran	354.324.000,00	320.772.715,00	90,53
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.080.000,00	7.080.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	21.627.000,00	6.168.500,00	28,52
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	325.617.000,00	307.524.215,00	94,44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	261.226.574,00	249.889.334,00	95,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	104.006.210,00	97.752.060,00	93,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25.474.090,00	20.391.000,00	80,05
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	131.746.274,00	131.746.274,00	100,00
JUMLAH		8.622.443.800,00	7.996.479.168,00	92,74

Berdasarkan Akuntabilitas Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 telah dilaksanakan dan tujuan telah tercapai. Secara keseluruhan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna telah tercapai, dari total pagu anggaran sebesar Rp. 8.622.443.800,- telah terealisasi Rp. 7.996.479.168,- atau dengan capaian sebesar 92,74% dan telah dilakukan efisiensi

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

sumber pendanaan sebesar Rp. 625.964.632,- (efisiensi sumber pendanaan sebesar 7,26%).

3.2.1 Rekapitulasi Utang dan Piutang Tahun 2025

Rekapitulasi Utang dan Piutang Tahun 2025 disajikan dalam Laporan SAKIP sebagai bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna. Rekapitulasi ini menggambarkan posisi kewajiban yang harus diselesaikan serta hak tagih yang masih harus diterima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Penyusunan data utang dan piutang dilakukan secara tertib dan akurat, serta telah diselaraskan dengan realisasi anggaran dan capaian kinerja, sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Informasi ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan ke depan, khususnya dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan serta mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Nomor: 800.1.3.2/13/BAPPERIDA-UP.1/I/2026 tentang Dokumen Reviu Hutang Bapperida Tahun 2025 ke Inspektur Kabupaten Natuna, Jumlah total Hutang yang disampain untuk direviu oleh Inspektorat dengan jumlah Rp. 4.623.081,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.26
Rekapitulasi Hutang Tahun 2025

No.	Sub Kegiatan	Jumlah Total Hutang (Rp)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.500.000,00	
2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	831.454,00	
3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD	211.745,00	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	549.068,00	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.530.814,00	
JUMLAH		4.623.081,00	

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

3.3 Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja

Untuk meningkatkan implementasi SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja. Upaya tersebut meliputi penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan agar lebih selaras dengan sasaran strategis, penguatan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi hasil, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Selain itu, juga memperhatikan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Sakip tahun sebelumnya dan Rekomendasi atas Laporan Reviu Internal Bapperida Tahun 2025.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sakip Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2024, terdapat 4 (empat) rekomendasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP, yaitu:

Tabel 3.27
Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Eviden
(1)	(2)	(3)	(4)
1	menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) pada laporan kinerja (LKJIP);	menyajikan dan menginformasikan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2025	Laporan Kinerja Tahun 2025
2	mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra) yang telah diformalkan di <i>website</i> resmi secara tepat waktu	mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra) yang telah diformalkan melalui <i>website</i> resmi secara tepat waktu sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.	Website: bp3d.natunakab.go.id
3	menetapkan anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	menetapkan anggaran dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja, di mana alokasi anggaran disusun dengan mengacu pada target dan indikator kinerja yang ingin dicapai.	DPPA Tahun 2025 dan DPA Tahun 2026

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Eviden
(1)	(2)	(3)	(4)
4	mengefisiensikan terhadap penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Menetapkan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian target kinerja serta melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran terhadap kegiatan yang kurang efektif atau berisiko rendah terhadap pencapaian kinerja.	DPPA Tahun 2025 dan DPA Tahun 2026

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Internal atas Laporan Kinerja, terdapat 2 (dua) rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti yaitu:

Tabel 3.28
Tindak Lanjut Laporan Hasil Reviu Internal atas Laporan Kinerja
Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Eviden
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyempurnaan analisis capaian kinerja dengan menambahkan penjelasan faktor pendukung, penghambat, serta indikator yang belum mencapai target.	Menyempurnakan Laporan Kinerja dengan memperkuat analisis capaian indikator, termasuk faktor pendukung, penghambat, dan penjelasan atas indikator yang belum tercapai.	Laporan Kinerja Tahun 2025
2	Penyempurnaan Redaksi penulisan dalam laporan Kinerja	Menyempurnakan Laporan terkait redaksi penulisan.	Laporan Kinerja Tahun 2025



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

BAB IV P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka perwujudan “*good governance*”. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan ke dalam Renstra Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang tersedia melalui APBD Kabupaten Natuna Tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.622.443.800,00 (Delapan milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). Dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pendukung semua indikator sasaran strategis baik Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Non IKU.

Sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna yang tercakup dalam 4 program dan 16 kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 dapat dicapai sepenuhnya dengan capaian 98,84% dengan kategori **“AA atau SANGAT MEMUASKAN”**. Hal ini menunjukkan adanya komitmen penuh dari Pimpinan (kepala) beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2025.

Faktor pendukung capaian indikator sasaran diantaranya Pemerintah Kabupaten Natuna juga memanfaatkan aplikasi perencanaan pembangunan daerah (e-Planning) milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi mulai dari RPJMD, Renstra, hingga Renja, serta disinkronkan dengan tahapan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang



2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna

Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang Kabupaten, sehingga proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan selaras antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah serta penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah telah berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi, yang diwujudkan melalui penyelarasan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja, dan RKPD dengan arah kebijakan, sasaran, serta prioritas pembangunan nasional dan Provinsi, sehingga perencanaan pembangunan daerah tersusun secara konsisten, terintegrasi, dan selaras antar jenjang pemerintahan.

Selain itu, hal yang tak kalah penting dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah adanya koordinasi yang baik dalam internal Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terhadap capaian indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui evaluasi hasil RKPD yang dilaksanakan setiap triwulan, dan peran pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam mendampingi dan menekankan kepada bidang-bidang yang membawahi SKPD sesuai bidangnya dalam mengawal dan mengevaluasi pencapaian indikator kinerjanya sehingga dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 2025-2029
Tahun 2025

MISI 4 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi				
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja
				2025
Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Pelayanan Publik	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Perencanaan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	98,75
			Indeks Inovasi Daerah	100,00
	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98,58
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	98,05
Nilai rata-rata capaian kinerja				98,84

**2025****Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Natuna**

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian kinerja Tahun 2025 diantaranya agar dapat melakukan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan agar realisasi capaian kinerja dan anggaran dapat tercapai sesuai target, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah terkait dengan pencapaian indikator yang memerlukan koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta meningkatkan kapasitas inovasi dengan melakukan pengembangan inovasi melalui riset, kolaborasi dengan dunia usaha dan perguruan tinggi serta meningkatkan kreatifitas yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Natuna dimasa datang.

Ranai, 19 Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE., MAP

NIP. 19731030 200012 1 003



**PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA**

2025

LAMPIRAN



bapperida@natunakab.go.id

<https://bp3d.natunakab.go.id>





PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOESTOFA ALBAKRY, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

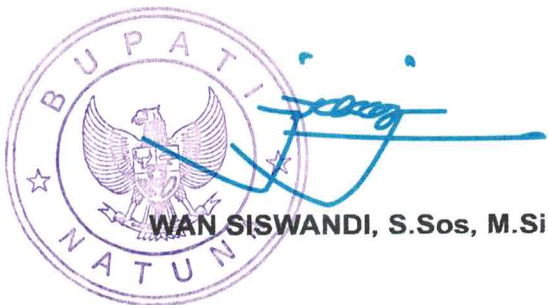
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Nilai	8.0
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Inovasi Dalam Peningkatan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,0155

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	8.223.471.894,00
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	2.900.838.334,00
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.769.706.520,00
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	982.917.900,00
Jumlah	Rp.	13.876.934.648,00

Ranai, 13 Januari 2025

Bupati Natuna,

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah


WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si


MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MOESTOFA ALBAKRY, SE**
Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **CEN SUI LAN**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

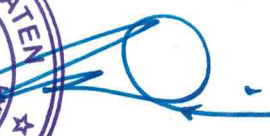
Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 13.876.934.648,00 (Tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 8.622.443.800,00 (Delapan milyar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 24 Oktober 2025

Pihak Kedua,


CEN SUI LAN

Pihak Pertama,


MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	42,87
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dalam Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan	Nilai	80

Jumlah Anggaran:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp	6.764.396.849,00
2. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	1.523.967.001,00
3. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	158.833.870,00
4. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	175.246.080,00
Jumlah	Rp	8.622.443.800,00

Ranai, 24 Oktober 2025

Pihak Kedua,



CEN SUI LAN

Pihak Pertama,



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	Nilai	80,00	79,00	98,75
2	Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	43,00	45,35	100,00
Capaian Kinerja						99,38

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.764.396.849,00	Rp. 6.569.614.199,00	97,12
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.523.967.001,00	Rp. 1.314.049.711,00	86,23
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 158.833.870,00	Rp. 70.830.385,00	44,59
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 175.246.080,00	Rp. 41.984.873,00	23,96
JUMLAH	Rp. 8.622.443.800,00	Rp. 7.996.479.168,00	92,74

Ranai, Januari 2026

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE., MAP
NIP. 19731030 200012 1 003

- MISI/SASARAN-INDIKATOR RPJMD
- SASARAN-INDIKATOR RENSTRA
- PROGRAM-INDIKATOR
- KEGIATAN-INDIKATOR
- SUB KEGIATAN-INDIKATOR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2025

